BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia termasuk ke dalam negara berkembang, sehingga Indonesia melaksanakan pembangunan nasional yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik secara materiil maupun spiritual. Dalam upaya merealisasikan tujuan tersebut, maka negara harus menggali sumber dana dalam negeri. Sumber dana tersebut berasal dari pajak dan non pajak.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta bagi masyarakat khususnya wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, pemerintah setiap tahun merumuskan suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk merencanakan bagaimana memperoleh penerimaan dan membelanjakan sumber daya yang telah diperoleh sesuai skala prioritas, sehingga di tengah keterbatasan pemerintah dapat melakukan poin-poin pembangunan yang ingin dicapai. Dalam struktur APBN, pendapatan negara terdiri atas pos penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Sedangkan belanja negara terdiri atas; belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, dan suspen belanja

negara. Sampai sekarang penerimaan pajak masih menjadi tulang punggung pendapatan negara.

Sumber penerimaan negara terdiri dari penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Jenis-jenis pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak Indonesia antara lain: pajak Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Bumi dan bangunan (PBB), Bea Materai (BM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak atas penjualan barang mewah (PPNBM), dan Bea Perolehan Hak Tanah atau Bangunan (BPHTB). Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak lainnya. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai Wajib Pajak. Demikian pula atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, terutang pajak penghasilan dan dalam hal ini yang bersifat final.

Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajak dari sistem *official-assessment* menjadi *sistem self-assessment*. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya (Resmi, 2019:11). Untuk menutupi kelemahan *self assessment system* digunakan sistem perpajakan yang lain yaitu sistem pemotongan (*with holding system*). *With holding system* adalah suatu cara pemungutan

pajak yang perhitungannya besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak dilakukan oleh pihak ketiga.

Pajak yang ditetapkan pemerintah salah satunya adalah Pajak Penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak. Ada beberapa jenis-jenis pajak penghasilan, yaitu: (1) Pajak Penghasilan Pasal 21; (2) Pajak Penghasilan Pasal 22; (3) Pajak Penghasilan Pasal 23; (4) Pajak Penghasilan Pasal 24; (5) Pajak Penghasilan Pasal 25; dan (6) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2.

Salah satu jenis pajak penghasilan yang menggunakan *with holding system* yaitu PPh Pasal 22. Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan re-impor. Melalui penerbitan peraturan No. 90/PMK.03/2015, pemerintah melebarkan badan-badan yang berhak memungut PPh Pasal 22 yaitu menjadi wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendahara pemerintah, termasuk bendahara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga negara lainnya, yaitu berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bahwa bendahara

adalah berkewajiban sebagai pemegang kas dan pejabat lainnya menjalankan fungsi yang sama.

Dasar hukum PPh pasal 22 adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Peraturan perpajakan ini mengatur bahwa bendaharawan pemerintah adalah pemotong/pemungut PPh Pasal 21, 22, 23, 4(2), dan PPN/PPnBM. Menurut Undang-Undang tersebut, Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah pajak yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga- lembaga pemerintah lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain. Sebagai pemungut pajak yaitu Direktorat Jendral Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah, baik yang ada di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang. Dan yang merupakan objek pemungutan PPh Pasal 22 adalah pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang dananya berasal dari belanja negara atau belanja daerah. Mekanismenya adalah ketika bendaharawan pemerintah melakukan belanja dengan menggunakan dana APBN/D, baik belanja pegawai, barang, jasa dan lainnya, maka bendaharawan wajib melakukan pemotongan/pemungutan pajak yang terkait dengan belanja tersebut. Sebagai wajib pajak, bendaharawan pemerintah memiliki kewajiban

yang sama sebagaimana wajib pajak orang pribadi maupun badan, dalam hal menghitung, menyetor/membayar, melaporkan pajak-pajaknya.

Transparasi dalam sistem pemerintahan semakin meningkat, tidak terkecuali transparasi perpajakan. Bendahara yang telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan. Tata cara perhitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh 22 yang dilakukan oleh bendahara pemerintah harus mematuhi aspek-aspek perpajakan sesuai dengan peraturan pemerintah. Pemungutan PPh 22 dilakukan untuk menjaring pajak penghasilan seperti impor barang dan pengadaan barang. Hal ini karena dalam aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi (perorangan atau badan usaha), karena beberapa hal untuk memenuhi kebutuhan barang baik itu bahan baku maupun barang jadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Clifvan (2014) menunjukkan bahwa perhitungan PPh 22 atas pengadaan barang selama tahun 2012 dan tahun 2013 pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung telah melaksanakan dengan sebaik-baiknya mengikuti pedoman PMK No. 210/PMK.03/2008 sedangkan untuk pelaporan PPh 22 tidak melaksanakan sesuai dengan pedoman PMK No. 210/PMK.03/2008. Dalam peraturan ini dijelaskan tentang tarif dan pengecualian pungutan PPh pasal 22, batas waktu jatuh tempo pembayaran atau penyetoran PPh pasal 22, penentuan tempat pembayaran dan penyetoran PPh pasal 22, dan penentuan pelaporan pajak penghasilan pasal 22.

Sebagai pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, bendahara pemerintah harus mengetahui aspek-aspek perpajakan terutama yang berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan serta pajak pertambahan nilai. Kewajiban bendahara pemerintah sehubungan dengan pajak penghasilan antara lain adalah pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan PPh pasal 22. Dalam kewajibannya melaksanakan pemotongan pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian barang yang dikenakan PPh pasal 22 dari perusahaan rekanan, kemudian menyetorkannya ke kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kewajiban untuk melaporkan pajak penghasilan pasal 22 yang dipotong ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sebagai pemungut pajak, kemungkinan masih banyak terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam penerapan perhitungan, pencatatan, pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 22 yang telah dipungut, sehingga bisa berpengaruh terhadap kerugian pendapatan perpajakan dan rekanan. Oleh sebab itu, sangat diperlukan pemahaman yang baik dan teliti pada evaluasi atas pemungutan dan pemotongan PPh Pasal 22 bendaharawan tersebut.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini hendak mengkaji mekanisme perhitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22 atas pembelian barang dan jasa di Instansi Pemerintah khususnya pada Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018.

Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan dapat menerapkan perhitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

Berdasarkan keterangan yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengajukan sebuah judul yang berkaitan dengan perhitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Instansi Pemerintah yang berada di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Judul yang diajukan penulis sehubungan dengan Tugas Akhir Penelitian adalah “Mekanisme Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan Atas Pembelian Barang Dan Jasa Di Instansi Pemerintahan (Studi Kasus Pada Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme perhitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22 atas pembelian barang dan jasa pemerintah sesuai dengan regulasi pemerintah?
2. Apakah mekanisme perhitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22 atas pembelian barang dan jasa di Instansi Pemerintah khususnya pada Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah dilaksanakan sesuai Peraturan

Pemerintah yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018?

1.3 Batasan Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Variabel dalam penelitian adalah mekanisme perhitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPH Pasal 22.
2. Tempat penelitian yaitu di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jalan Ring Road Utara Maguwoharjo, Depok, Sleman Yogyakarta.
3. Periode penelitian pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2022.

1.4 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana mekanisme perhitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 sesuai dengan regulasi pemerintah.
2. Mengetahui kesesuaian mekanisme perhitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 yang dilaksanakan oleh Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan peraturan yang berlaku.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat-manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, antara lain adalah:

1. Bagi Peneliti

Menambah wawasan mengenai perhitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian barang dan jasa pada instansi pemerintah.

2. Bagi Kampus STIE SBI Yogyakarta

Menjadi referensi atau masukan bagi mahasiswa dalam perkembangan ilmu perpajakan dan menambah kajian ilmu perpajakan terutama tentang pajak penghasilan pasal 22 untuk penyajian informasi penelitian selanjutnya.

3. Bagi Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Menjadi referensi atau masukan dalam menerapkan perhitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian barang dan jasa.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan agar mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai tugas akhir ini. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II akan menguraikan tentang penelitian terdahulu, teori-teori mengenai konsep pajak, akuntansi perpajakan, pengertian pajak, fungsi pajak, sistem pemungutan pajak, pajak penghasilan pasal 22, definisi PPh pasal 22, dasar dan tarif PPh pasal 22, pengadaan barang dan jasa, selain itu juga menguraikan tentang kerangka pikir penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III mencakup uraian tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, data penelitian, teknik pengumpulan data, rancangan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, serta diskripsi atau profil Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi: sejarah berdirinya organisasi, visi, misi, kedudukan, tugas dan fungsi, uraian tugas dan sarana dan prasarana yang dimiliki.

BAB IV DATA DAN ANALISIS DATA

Bab IV akan menguraikan tentang pengambilan data pada lokasi penelitian. Pada bab ini juga akan menguraikan hasil analisis data yang diperoleh dari lapangan dan atau berupa dokumen terkait penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab V merupakan pernyataan singkat dan tepat kesimpulan dan saran yang diberikan berdasarkan hasil analisis, pengalaman dan pertimbangan penulis untuk kemajuan objek penelitian.